

ABSTRAK

Latar belakang penulisan tesis ini dikarenakan PPAT yang merupakan pejabat telah diberikan wewenang oleh Negara dalam hal mencatat pada akta terkait peristiwa atau proses yang melahirkan kesepakatan antara dua orang ataupun lebih. Tindakan hukum yang dilakukan PPAT yakni membuat dokumen palsu yang merugikan para pihak pemegang sertifikat tanah harus memberikan ganti rugi. Dalam putusan Mahkamah Agung NO. 424 K/TUN/2013 telah diputus berkekuatan hukum tetap namun belum ada kejelasan dari nasib pemegang sertifikat awal dalam hal ganti rugi yang didapatkan. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu mengenai yang pertama mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban dan Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Akibat Dari Perbuatan PPAT Yang Melakukan Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah, sedangkan yang kedua yakni tentang Implikasi Akta Jual Beli yang Dibuat PPAT Sebagai Objek Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian tesis ini yaitu untuk pembahasan pertama mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban dan Upaya Hukum yakni perlindungan hukum represif dan preventif yang dapat ditempuh akibat dari Perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah pada kasus tersebut diatas.

Pemilik tanah dapat melakukan gugatan atau pelaporan terhadap penyalahgunaan wewenang PPAT dalam hal membuat akta jual beli merupakan suatu bentuk dari Perlindungan hukum represif. Sedangkan untuk perlindungan hukum preventif yakni pemilik tanah bisa mendapatkan ganti rugi berupa sejumlah uang dan / sertifikat tanah dapat dikembalikan ke pada pemilik tanah. Sesuai dengan ganti rugi apa yang didapatkan atas kasus tersebut yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/TUN/2013. Sedangkan untuk pembahasan rumusan masalah kedua terkait Implikasi Akta Jual Beli yang Dibuat oleh PPAT Sebagai Objek Tindak Pidana Pemalsuan Surat yakni penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT. Artinya, sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata tergolong jenis pelanggaran atau sanksi kode etik IPPAT, namun dalam proses pengkualifikasian pelanggaran aspek formal tersebut suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila seorang PPAT melakukan pelanggaran dari aspek formal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPAT, Akta Jual Beli.

ABSTRACT

The background of writing this thesis is because PPAT which is an official has been given authority by the State in terms of recording on the deed related events or processes that gave birth to an agreement between two or more people. The legal action taken by the PPAT is to produce false documents which are detrimental to the holders of land certificates, which must provide compensation. In the Supreme Court decision NO. 424 K / TUN / 2013 has been severed with permanent legal force but there is no clarity on the fate of the initial certificate holder in terms of compensation received.

The formulation of the problem in this thesis is regarding the first concerning the Form of Legal Protection Provided to Victims and Legal Efforts that Can Be Taken As a Result of the Actions of PPAT Conducting Falsification of Land Purchase Deed, while the second is concerning the Implications of Sale and Purchase Deed that PPAT Made as Action Objects Criminal Forgery Letters. The research method used in the writing of this thesis is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The results of this thesis research are for the first discussion about the Form of Legal Protection Given to Victims and Legal Efforts, namely repressive and preventive legal protection that can be taken as a result of the Acts of Land Deed Making Officials Who Falsify Deed of Sale of Land in the case above. Landowners can file a lawsuit or report abuse of PPAT's authority in terms of making the sale and purchase deed a form of repressive legal protection. Whereas for preventive legal protection that is the land owner can get compensation in the form of a sum of money and / land certificate can be returned to the land owner. In accordance with what compensation was obtained for the case contained in the Decision of the Supreme Court No. 424 K / TUN / 2013. Whereas for the discussion of the formulation of the second problem related to the Implications of the Sale and Purchase Deed Made by the PPAT as the Object of the Act of Falsification of Letters namely the imposition of criminal sanctions against the PPAT. This means that sanctions or penalties that can be imposed in the form of administrative sanctions and civil sanctions are classified as types of violations or sanctions IPPAT code of conduct, but in the process of qualifying violations of formal aspects such a criminal act is an act without a legal basis that cannot be accounted for if a PPAT commits a violation of formal aspect.

Keywords: Legal Protection, PPAT, Deed of Sale and Purchase.